

Analisis Strategi Industri Pertahanan dalam Mendukung Pertahanan Negara

**Moh. Fakhruddin Farhan¹ Fiorentina Nulhakim², Hadi Sulistiyo³, Hazen Alrasyid⁴,
Nadia Aurora Soraya⁵, Virgin Kristina Ayu⁶**

^{1,2,3,4,5,6} Department of Defense Industry, Faculty of Defense Technology, Republic of Indonesia Defense University

Abstrak

Pertahanan negara atau pertahanan nasional merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, serta menjamin keamanan seluruh warga negara dari segala ancaman terhadap bangsa dan negara baik yang datang dari internal maupun eksternal. Pada era industri 4.0, ancaman pertahanan negara semakin beragam dan mengganggu stabilitas pertahanan negara termasuk pada sektor industri pertahanan. Sehingga diperlukan strategi pertahanan negara yang baik dan mampu menghadapi ancaman pertahanan negara yang semakin maju. Pemberdayaan industri pertahanan yang mandiri merupakan strategi yang bisa diterapkan untuk mendukung pertahanan negara sekaligus pertumbuhan industri dalam negeri. Menggunakan analisis SWOT, didapatkan hasil analisis berada pada kuadran I progresif dengan nilai 0.775 dan 0.115. Adapun strategi yang dihasilkan ialah S-O yakni membuat kebijakan terkait dukungan pemerintah kepada BUMS untuk berperan menjadi bagian dari rantai pasok industri pertahanan, membuat kebijakan dan aturan tentang investasi asing dan kerjasamanya terhadap industri pertahanan dalam negeri, membuat kawasan industri pertahanan untuk mendukung kegiatan produksi dan pengembangan, serta menyerap tenaga kerja dalam negeri dan asing yang sesuai dalam rangka pengembangan sumber daya manusia untuk kemajuan industri pertahanan.

Kata Kunci: *Pertahanan Negara, Industri Pertahanan, Analisis SWOT*

Copyright (c) 2023 Moh. Fakhruddin Farhan

✉ Corresponding author :

Email Address : moh.farhan@tp.idu.ac.id

PENDAHULUAN

Aspek pertahanan dalam bernegara merupakan aspek penting untuk menjamin kelangsungan hidup bernegara. Bila tidak mampu mempertahankan negara dari datangnya ancaman dengan berbagai dimensi yang semakin berkembang, suatu negara tidak akan mampu mempertahankan keberadaan negara. Dalam hal ini, pertahanan negara atau pertahanan nasional merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, serta menjamin keamanan seluruh warga negara dari segala ancaman terhadap bangsa dan negara baik yang datang dari internal maupun eksternal. Dalam upaya mengembangkan dan mewujudkan kemampuan pertahanan negara, sistem pertahanan negara harus dengan seksama diselenggarakan pemerintah dan dioptimalkan persiapannya pada tingkat setinggi-tingginya. Dalam makna hakikatnya, pertahanan negara merupakan suatu rangkaian usaha yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dengan berlandaskan kesadaran terhadap hak serta kewajiban seluruh warga

negara dan atas kemandirian untuk memelihara eksistensi bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bersatu [1]. Untuk itu sudah seharusnya setiap elemen dalam negara ikut andil dalam melakukan kegiatan yang mendukung pertahanan negara. Dalam segala bidang di masing-masing peran dibutuhkan kesadaran untuk meningkatkan dan menjaga pertahanan negara.

Industri Pertahanan mampu memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi dan industri nasional, yakni dengan cara turut andil dalam menggairahkan pertumbuhan industri nasional yang berskala internasional. Hal itu bisa dilakukan dengan cara peningkatan sumber daya manusia dengan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup signifikan, dalam ranah sector penelitian bisa dilakukan dengan melakukan transfer teknologi yang dapat menggairahkan sektor penelitian dan pengembangan. Hal itu bisa sekaligus membantu memenuhi kebutuhan sektor pendidikan nasional di bidang sains dan teknologi [2]. Dengan adanya kerja sama yang terukur dan strategis dari sector industri dan penelitian dan pengembangan akan memicu perkembangan industri dalam negeri. Kesenjangan antara penelitian dan pengembangan di bidang teknologi yang menunjang industri pertahanan tentunya akan menjadi masalah terhadap kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Dengan hal itu dibiarkan terjadi terus-menerus maka industri pertahanan akan lebih lama bergantung pada teknologi luar negeri sehingga bisa semakin jauh dari kemandirian. Dukungan untuk pengembangan penelitian dalam hal teknologi untuk memajukan industri pertahanan perlu diperhatikan untuk tujuan jangka panjang. Karena seiring berkembangnya sektor pertahanan, pasti akan menciptakan lapangan kerja baru, merangsang perluasan industri lain karena banyaknya interkoneksi hulu dan hilir, dan mempercepat kemajuan teknologi. Di mana hal tersebut akan mengurangi biaya yang biasanya dihabiskan untuk mengimpor berbagai alutsista dari luar negeri. [3]. Selain itu, agar bidang pertahanan negara memiliki kompetensi inti yang berdaya saing di tingkat regional dan global, perlu adanya dukungan yang luas di tingkat nasional. Kesepakatan tersebut dapat dipraktikkan dengan meningkatkan kerjasama antar organisasi yang terlibat langsung dalam pembelian alutsista, khususnya Kementerian Pertahanan, TNI, dan pihak produsen dalam negeri untuk membangun fasilitas pertahanan berbasis industri pertahanan dalam negeri [4].

Sehingga untuk memenuhi tujuan MEF Tahap I, Undang-Undang nomor 16 yang mengatur industri pertahanan diterbitkan pada tahun 2012. Undang-undang ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan dan optimalisasi industri pertahanan dalam negeri [5]. Pengoptimalan dan upaya memperkuat industri pertahanan ini ialah dalam rangka mendukung tercapainya MEF tahun 2024 dan memenuhi permintaan pasokan alutsista yang digunakan TNI. Adapun tujuan lainnya adalah untuk mencapai kemandirian industri pertahanan pada tahun 2029 dalam pengadaan alutsista TNI [6]. Pembentukan KKIP merupakan salah satu syarat yang digariskan dalam statuta, yang kemudian disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2013 [7]. Sikap dan keberadaan KKIP yang ada dalam mendukung pertumbuhan industri pertahanan Indonesia juga diperjelas dalam Undang-Undang Industri Pertahanan tersebut. Dalam rangka membangun dan mengembangkan industri pertahanan nasional, kerjasama internasional harus dikoordinasikan. Sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 42 tahun 2010 yang kemudian diperbaharui dengan Keppres Nomor 59 Tahun 2013, tugas KKIP adalah menetapkan kebijakan industri pertahanan nasional pada tingkat strategis, mengkoordinasikan pengelolaan kebijakan tersebut, menyusun dan menyusun rencana induk jangka panjang industri, menetapkan standar produk industri pertahanan, dan menetapkan kebijakan untuk memenuhi standar tersebut [8].

Hingga saat ini, industri dan teknologi pertahanan masih memerlukan penataan untuk meningkatkan keberdayaannya. Penataan tersebut berkaitan dengan teknologi yang hendak digunakan untuk pemeliharaan produk maupun produksi, serta biaya modal umum dan keuangannya. Regulasi yang mengatur output dan produktivitas perusahaan industri pertahanan sendiri masih membutuhkan perhatian yang cermat dan berkelanjutan. Biaya modal akan dipengaruhi oleh perbankan dan keuangan dalam dan luar negeri. Bukan sekedar

keinginan, niat pemerintah untuk benar-benar meningkatkan dan mengembangkan teknologi pada bidang pertahanan harus diwujudkan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan kemauan politik dan dukungan kebijakan yang dapat memfasilitasi kemajuan sektor industri pertahanan sesuai dengan tujuan bersama [9].

Penyelenggaraan industri pertahanan sebagai perluasan dan grand strategy KKIP bertujuan untuk mandiri dalam hal memenuhi seluruh kebutuhan alutsista, meningkatkan kemampuan produksi dan jasa pemeliharaan untuk membangun keamanan dan kekuatan pertahanan negara yang handal dan tangguh. Grand Strategy juga dibuat dengan maksud mengembangkan kapasitas teknologi industri pertahanan dan memperkuatnya. Penyelenggaraan sektor pertahanan juga bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional. Melalui multiplier effect, hal ini dapat dilakukan dengan memperluas prospek lapangan kerja dan kegiatan ekonomi, serta mendorong perluasan industri hulu dan hilir [10].

Mempelajari masalah-masalah yang melatarbelakangi terkait perkembangan industri pertahanan tersebut diatas, dapat digarisbawahi pokok permasalahan yang bisa diteliti pada penelitian ini. Yakni terkait apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan industri pertahanan. Hingga kemudian bisa diteliti terkait bagaimana upaya-upaya dalam mendukung kemandirian Industri Pertahanan dengan menggunakan pendekatan system thinking dan analisis SWOT.

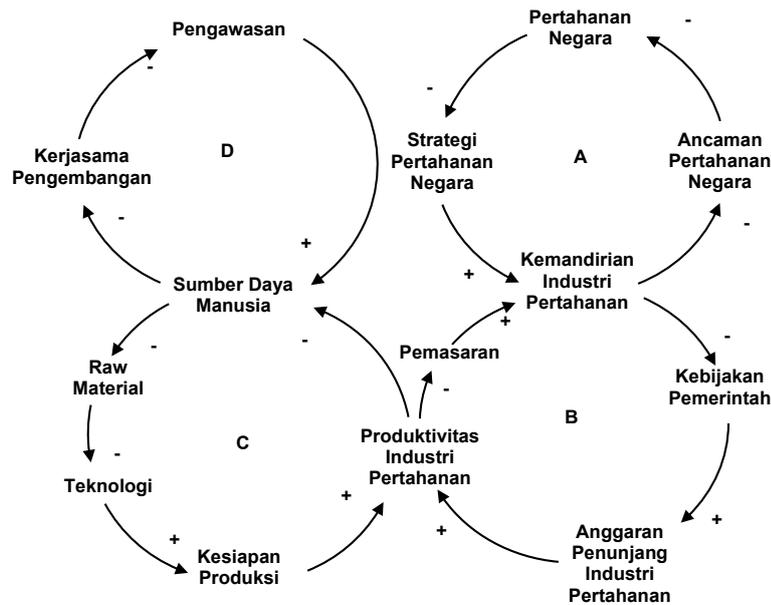
METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan sumber data dari *literature review* yang kemudian diolah menggunakan *system thinking* dan analisis SWOT untuk menentukan strategi industri pertahanan dalam mendukung pertumbuhan industri dalam negeri. Metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan menyeluruh, strategi melibatkan fenomena masalah dan menganalisis strukturnya untuk dinyatakan dalam model sistem. [11] dalam bukunya *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization* menjelaskan bahwa "*System thinking* adalah sebuah disiplin untuk melihat keutuhan". Dengan menggunakan analisis SWOT, sebuah perusahaan dapat menemukan berbagai komponen yang ada untuk menciptakan strategi perusahaannya sendiri. Kajian dilakukan secara logis, dengan fitur kekuatan dan kemungkinan yang dimaksimalkan serta aspek kelemahan dan ancaman yang sekaligus dihilangkan [12]. Tujuan dari analisis SWOT yang digunakan dalam analisis ini adalah untuk dapat mengidentifikasi elemen kunci dari ancaman, peluang, kelemahan, dan kekuatan saat ini. Analisis SWOT digunakan untuk memetakan keuntungan, kerugian, peluang, dan ancaman dari peristiwa saat ini. Sehingga mampu didapatkan saran ataupun strategi terkait cara mengatasi fenomena masalah yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Industri Pertahanan

Berkaitan dengan pertahanan negara, diagram *archetype* pada gambar 1 berikut menjelaskan bahwa berawal dari adanya ancaman dengan berbagai motif yang menyerang pertahanan negara, maka perlu disusun strategi pertahanan negara.



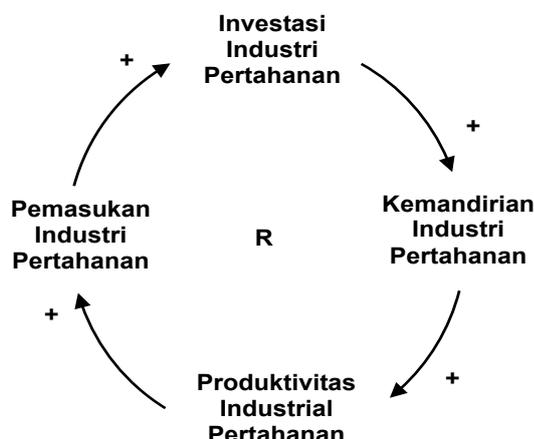
Gambar 1 Diagram lingkaran sebab akibat industri pertahanan

Pada era industri 4.0 ini ancaman pertahanan negara semakin beragam dan mengancam di berbagai sisi. Ancaman ini tentu mengganggu stabilitas pertahanan negara sehingga negara memerlukan strategi pertahanan negara yang baik dan mampu menghadapi ancaman pertahanan negara yang semakin maju. Strategi yang ditentukan ialah dengan memberdayakan kemandirian industri pertahanan. Karena hal itu akan berpotensi untuk mengurangi atau mengatasi ancaman pertahanan negara. Dalam aplikasinya, kemandirian industri pertahanan membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah. Salah satu kebijakan yang dibutuhkan ialah penambahan anggaran penunjang industri pertahanan. Anggaran penunjang ini berpengaruh untuk meningkatkan produktivitas industri pertahanan. Hal yang dibutuhkan untuk mencapai industri pertahanan yang mandiri dan produktif dibutuhkan strategi pemasaran yang tepat. Agar cita-cita kemandirian industri pertahanan bisa tercapai dan bisa diberdayakan lebih cepat. Produktivitas industri pertahanan membutuhkan sumber daya manusia, raw material, dan teknologi. Ketiga hal ini mendukung kesiapan produksi. Apabila kesiapan produksi baik maka produktivitas industri pertahanan meningkat. Adapun sumber daya manusia membutuhkan kerjasama pengembangan dan pengawasan untuk menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten.

Upaya Dalam Pengembangan Industri Pertahanan

Pembangunan industri pertahanan merupakan bagian dari penyelenggaraan pertahanan secara keseluruhan dan pembangunan negara secara umum. Dalam konteks konsep Tiga Pilar Industri Pertahanan, konsep pengembangan Industri Pertahanan meliputi pengguna (Kementerian Pertahanan (Kemhan dan TNI), pihak produsen, perancang, penguji, peneliti yang berkualitas, dan perencana yang sesuai. [1]. Industri pertahanan masih membutuhkan langkah-langkah untuk memperkuat pemberdayaannya. Produksi dan produktivitas dalam sektor industri pertahanan itu sendiri harus dipertimbangkan secara hati-hati dan teratur, begitu juga dengan teknologi yang akan digunakan, biaya modal dan keuangan secara umum. Biaya modal akan dipengaruhi oleh perbankan dan keuangan dalam dan luar negeri. Dilema pengembangan sumber daya manusia untuk industri pertahanan dihadapkan pada keadaan yang menantang karena keterbatasan anggaran pertahanan suatu negara. Pada akhirnya, negara akan memprioritaskan persyaratan postur pertahanan daripada tindakan untuk memajukan sektor pertahanan. Kalaupun ada negara yang menjalankan tersebut, lebih banyak untuk kebutuhan pemeliharaan yang semata-mata terkait dengan keberadaan industri pertahanan, sehingga secara praktis sulit ditemukan suatu negara yang berupaya untuk meningkatkan SDM bidang pertahanannya.

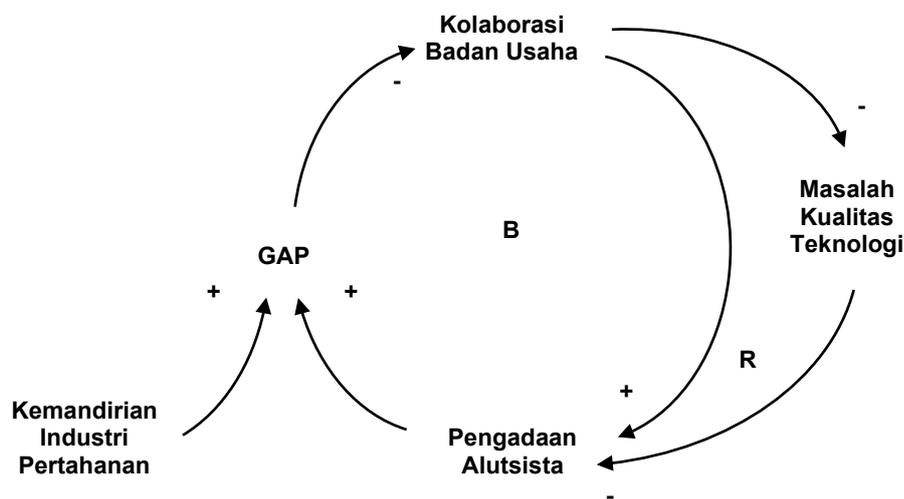
Gambaran pendekatan *system thinking* pada gambar 2 berikut digunakan untuk menggambarkan hubungan sebab akibat antara faktor-faktor yang saling memberikan dampak terhadap Industri Pertahanan.



Gambar 2 Diagram lingkaran sebab akibat kemandirian Industri Pertahanan

Berangkat dari diagram sebab akibat pada gambar 2, maka dapat dijelaskan bahwa pemasukan atau pendanaan yang dimiliki oleh pelaku industri pertahanan akan berpengaruh pada besaran investasi dalam bidang pertahanan yang dimiliki. Sehingga, semakin besar nilai investasi yang dialokasikan untuk pengadaan alutsista akan semakin mendukung tujuan Negara Indonesia dalam mencapai kemandirian Industri Pertahanan, dimana para pelaku industri pertahanan dalam Negeri dalam produktivitas industrial akan meningkat. Dengan demikian, pemasukan atau dana yang diperoleh pun akan bertambah pula.

Selain daripada yang dijelaskan dalam gambar 2 diatas, gambar 3 berikut akan menggambarkan lebih jelas mengenai hubungan antara variabel dalam sistem yang mencakup permasalahan, target, *gap* dan aksi yang satu sama lain saling berkaitan dan saling mempengaruhi.



Gambar 3 Diagram *archetype Fixed That Fail* Kemandirian Industri Pertahanan

Berdasarkan loop diatas dijelaskan bahwa keadaan yang diinginkan berupa kemandirian industri pertahanan tetapi terdapat *gap* berupa pendanaan dan bahan baku yang belum memadai karena adanya impor bahan baku. Maka aksi yang diambil adalah dilakukan kolaborasi badan usaha di mana terdiri dari BUMN dan BUMS. BUMS bisa berinvestasi lebih banyak dalam industri pertahanan sebagai aturan baru UU Ciptaker, maka akan meningkatkan pengadaan alutsista. Tetapi dalam menjalankan aksinya menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga berupa kualitas teknologi yang tidak cukup canggih. Akhirnya akan berpengaruh terhadap pengadaan alutsista yang harus bekerjasama dengan

negara lain untuk alih teknologi karena masalah teknologi ternyata mengurangi dalam pengadaan alutsista.

ANALISIS SWOT

Dalam menganalisis masalah sistem dilakukan analisis dengan menggunakan SWOT. Analisis berisi tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari permasalahan yang telah terurai dari *system thinking* sebelumnya. Analisis SWOT dari sistem masalah ditunjukkan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Bobot Analisis SWOT

	STRENGTH	Weight	Rating	W x R
IFAS	Dukungan kebijakan pemerintah melalui UU Cipta Kerja	0.16	4	0.64
	Keterbukaan untuk Investasi asing dalam peningkatan industri pertahanan	0.105	3	0.315
	Hubungan kerjasama yang baik dengan negara-negara yang memiliki industri pertahanan yang maju	0.125	4	0.5
	Banyaknya lahan yang masih bisa dimanfaatkan untuk perluasan pabrik produksi industri pertahanan	0.11	3	0.33
	WEAKNESS			
	Teknologi yang belum memadai	0.14	2	0.28
	Kualitas sumber daya manusia yang belum mumpuni dalam mengembangkan industri pertahanan	0.095	2	0.19
	Anggaran yang masih rendah untuk mendukung pertumbuhan industri pertahanan	0.165	2	0.33
	Bahan baku untuk produksi masih mengandalkan import	0.1	2	0.2
EFAS	OPPORTUNITIES	Weight	Rating	W x R
	Kerjasama dalam pengembangan teknologi industri pertahanan dengan industri pertahanan negara maju	0.165	3	0.495
	Pembukaan investasi kepada asing untuk mendapatkan dana pendukung pengembangan industri pertahanan lebih banyak dengan syarat-syarat tertentu yang membawa benefit lebih pada industri pertahanan dalam negeri	0.115	3	0.345
	Melakukan kolaborasi dengan BUMS dalam pemenuhan bahan baku dalam negeri dalam hal sumber daya maupun anggaran	0.115	3	0.345
	Jalur rantai pasok di Indonesia merupakan jalur strategis sehingga membuka kesempatan lebar untuk kolaborasi dengan negara maju lainnya	0.105	3	0.315
	THREATS			

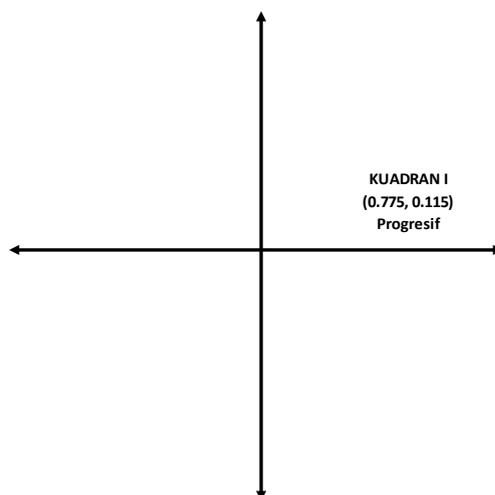
Implementasi teknologi baru pada produksi di industri pertahanan membutuhkan penyesuaian sehingga membutuhkan waktu yang lama	0.155	3	0.465
Kualitas produk industri pertahanan luar negeri lebih baik sehingga user kemungkinan lebih memilih industri pertahanan luar negeri	0.125	3	0.375
Inisiasi dalam rekayasa rantai pasok membutuhkan waktu dan biaya yang besar dan competitor sudah memiliki alur rantai pasok yang sudah stabil	0.115	2	0.23
Banyak BUMS yang belum berpengalaman dalam pengerjaan produk industri pertahanan sehingga memungkinkan membutuhkan waktu dan langkah penyesuaian yang lebih lama	0.105	3	0.315

Dari hasil pembobotan yang diperoleh kemudian dibuat matriks SWOT seperti pada Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. SWOT Matrix

EFAS/IFAS	Strength	Weakness
Opportunity	SO = 1.785 + 1.5 = 3.28	WO = 1 + 1.5 = 2.5
Threat	ST = 1.785 + 1.385 = 3.16	WT = 1 + 1.385 = 2.38

Sehingga dari matriks tersebut dapat ditentukan letak kuadrannya yaitu seperti pada Gambar 4 sebagai berikut.



Gambar 4. Posisi Quadran Hasil Pembobotan

Sehingga hasil dari kuadran yang telah ditentukan menghasilkan strategi yang dapat diterapkan yaitu ST atau *Strength Threat* yang dijelaskan pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Hasil Strategi *Strength Threat* Industri Pertahanan

SWOT ANALYSIS	STRENGTH
---------------	----------

		1	Dukungan kebijakan pemerintah melalui UU Cipta Kerja
		2	Keterbukaan untuk Investasi asing dalam peningkatan industri pertahanan
		3	Hubungan kerjasama yang baik dengan negara-negara yang memiliki industri pertahanan yang maju
		4	Banyaknya lahan yang masih bisa dimanfaatkan untuk perluasan pabrik produksi industri pertahanan
THREATS		STRENGTH & OPPORTUNITY STRATEGY	
1	Kerjasama dalam pengembangan teknologi industri pertahanan dengan industri pertahanan negara maju	1	Membuat kebijakan terkait dukungan pemerintah kepada BUMS untuk berperan menjadi bagian dari rantai pasok industri pertahanan
2	Pembukaan investasi kepada asing untuk mendapatkan dana pendukung pengembangan industri pertahanan lebih banyak dengan syarat-syarat tertentu yang membawa benefit lebih pada industri pertahanan dalam negeri	2	Membuat kebijakan dan aturan tentang investasi asing dan kerjasamanya terhadap industri pertahanan dalam negeri
3	Melakukan kolaborasi dengan BUMS dalam pemenuhan bahan baku dalam negeri dalam hal sumber daya maupun anggaran	3	Membuat kawasan industri pertahanan untuk mendukung kegiatan produksi dan pengembangan
4	Jalur rantai pasok di Indonesia merupakan jalur strategis sehingga membuka kesempatan lebar untuk kolaborasi dengan negara maju lainnya	4	Menyerap tenaga kerja dalam negeri dan asing yang sesuai dalam rangka pengembangan sumber daya manusia untuk kemajuan industri pertahanan

Sehingga rekomendasi yang diperoleh dari hasil analisis ialah membuat kebijakan terkait dukungan pemerintah kepada BUMS untuk berperan menjadi bagian dari rantai pasok industri pertahanan. Hal ini dilaksanakan dengan terbitnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 74, perubahan menjadi industri alat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan: a. Badan Usaha Milik Negara; dan/ atau b. Badan Usaha Milik Swasta, ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pemadu utama (lead integrator) yang menghasilkan alat utama sistem senjata dan/ atau mengintegrasikan semua komponen utama, komponen, dan bahan baku menjadi alat utama. Artinya saat ini BUMS akan mampu berkontribusi sebagaimana BUMN dalam menghasilkan alutsista. Kebijakan lanjutan yang perlu dikaji sebagaimana hasil analisis yaitu kebijakan tentang investasi asing

dan kerjasamanya terhadap industri pertahanan dalam negeri. Hal ini perlu dilakukan dengan kajian mendetail karena berkaitan dengan pertumbuhan industri dalam negeri khususnya industri pertahanan. Selain itu investasi perlu dipagari dengan kebijakan-kebijakan terkait agar tetap dalam kontrol kementerian pertahanan karena berkaitan dengan pertahanan negara. Untuk mendukung hal-hal tersebut perlu dilakukan pengembangan sumber daya manusia dengan menyerap tenaga kerja dalam dan luar negeri yang sesuai dengan kompetensi dengan pengawasan dan perencanaan yang tepat. Hal itu diperlukan untuk kemajuan industri pertahanan. Teknologi yang canggih, pendanaan yang memadai akan tidak menghasilkan output yang sebanding bila sumber daya manusia yang andil langsung dalam industri pertahanan memiliki kompetensi yang terbatas. Jalur logistik dengan mensentralkan industri pertahanan adalah hal penting lain untuk menunjang kemajuan industri pertahanan. Pembentukan Kawasan industri pertahanan akan mengefektifkan peran industri pertahanan dalam naungan holding industri pertahanan. Sehingga setiap industri pertahanan yang berkaitan lebih cepat sirkulasinya dalam sistem rantai pasok industri pertahanan.

SIMPULAN

Faktor-faktor penting yang memengaruhi perkembangan industri pertahanan Indonesia diantaranya ialah kebijakan pemerintah, anggaran, pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan produksi, kerjasama, pemasaran, dan pengawasan. Dalam hal anggaran, diagram sebab akibat menjelaskan bahwa untuk mencapai kemandirian industri pertahanan, diperlukan produktivitas industri yang terus meningkat agar menambah pemasukan industri pertahanan yang akan menambah pula nilai investasi industri pertahanan. Dengan skema tersebut, kemandirian industri pertahanan akan mudah dicapai karena anggaran merupakan dukungan inti agar berjalannya industri selaras dengan meningkatnya pertahanan negara. Jalan lain bisa dilakukan dengan adanya kolaborasi badan usaha yakni BUMN dan BUMS. Kolaborasi tersebut akan meningkatkan pengadaan alutsista namun terdapat konsekuensi yakni masalah kualitas teknologi industri pertahanan. Akhirnya akan berpengaruh terhadap pengadaan alutsista yang harus bekerjasama dengan negara lain untuk alih teknologi karena masalah teknologi ternyata mengurangi dalam pengadaan alutsista.

Referensi :

- Alkrimi, Y., & Khemalkem, R. 2012. What Drive Customers to Spread The Word in Social Media. *Journal of Marketing Research and Case Studies*.
- Als'ald, H. Albu-Rummaln. 2014. The Impact of Social Media marketing on Brand Equity: An Empirical Study on Mobile Service Providers in Jordan. *Journal Society of Interdisciplinary Business Research*
- Altmoko, Bambang Dwi. 2012. *Instalgram Handbook*. Jakarta: Media Kita
- Chreswell, John W. 2013. "Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed". *Pustaka Pelajar*. Edisi ketiga. Yogyakarta.
- Dwijalyanti, Al., & Pralmesti, P. (2021). *Pengaruh Strategi Pemasaran Digital menggunakan E-Commerce dalam Mempertahankan Bisnis UMKM*. *IKRAITH-AIBDIMAIS*, 4(2), 68-73.
- Evans, Dalve dan Jalke Mcke. 2013. *Social Media Marketing: The Next Generation Of Business Engagement*. Canada: John Wiley & Sons, Inc.
- Firmansyah Kurnaldi. 2010. *Pengaruh Bialy Promosi dan Distribusi terhadap Peningkatan Volume Penjualan pada CV. Sejalti Sralgen*.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21 Edisi 7*. Semarang: Universitas Diponegoro

- Haldi, Al. S., & Khaliri, Al. (2020). Pemilihan Strategi Pemaksimalan di Era Digital pada Kelompok Ibu PKK Desa Gadingharjo. *DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 127-132.
- Halriyanti, N. T., & Wiraprajal, Al. (2018). PENGARUH INFLUENCER MARKETING SEBAGAI STRATEGI PEMASARAN DIGITAL ERA MODEREN (SEBUAH STUDI LITERATUR). *Jurnal EKSEKUTIF*, 15(1), 133-146.
- Kotler, Philip, Kevin Lane Keller. 2012. *Marketing Management*, 14th Edition. United States of America : Pearson.
- Kotler, Philip, dan Gary Armstrong, 2014, *Principles Of Marketing*, New Jersey : Pearson Prentice Hall, USA